

PERAN DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN UMKM DI INDONESIA

Ana Widya Puspitasari

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Mojopahit 666B Sidoarjo

Email: anaw4509@gmail.com

Abstrak: Karakteristik perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga, karena perbankan syariah didasarkan pada pembiayaan bagi hasil yang dikembangkan melalui produk pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Dengan demikian, kehadiran perbankan syariah seharusnya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor riil. Salah satu unit usaha yang perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dalam perekonomian nasional saat ini memiliki posisi yang sangat penting. Banyak masyarakat yang berekspektasi terlalu besar terhadap peran bank syariah dalam mengembangkan UMKM. Padahal sistem keuangan syariah nasional mempunyai permasalahan fundamental yang menyebabkan berbagai pihak terkait mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan fungsi syariah sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Tantangan utama lembaga keuangan syariah adalah menyelesaikan permasalahan yang terdiri dari kerangka sistem yang berbasis pada bunga dan ketidakstabilan standar mata uang.

Kata Kunci: bank syariah, UMKM, keuangan syariah

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan perbankannya dengan prinsip syariah (hukum Islam), bank ini menghimpun dana dengan tidak memberikan imbalan bunga dan dalam pinjaman tidak dipungut bunga. Sistem yang mendasarinya yaitu larangan agama Islam untuk tidak memungut maupun meminjamkan dengan bunga atau yang sering disebut riba. Prinsip yang dianut oleh bank syariah dalam melaksanakan tujuannya antara lain prinsip murabahah, prinsip mudharabah, prinsip musyarakah, prinsip wadiah dan prinsip ijarah.

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala bentuk perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagaimana cara berperilaku dan kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiah.

Pada tahun 1997-1998 Indonesia sedang mengalami krisis moneter yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin meningkat. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah berperan penting dalam mengatasi krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia. Di sisi lain, sektor usaha mikro kecil dan menengah juga mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Hal ini bisa terjadi karena UMKM menggunakan sumber daya dalam negeri baik sumber daya manusia, bahan baku dan peralatan sehingga mereka tidak tergantung pada ekspor. Selain itu, hasil produksi dari sektor UMKM ditujukan untuk memenuhi pangsa pasar dalam negeri.

Bukti komitmen perbankan syariah terhadap peberdayaan ekonomi rakyat adalah dengan memberikan pembiayaan yang disalurkan kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Fokus utama bank syariah adalah penyaluran modal ke sektor UMKM yang notabene membutuhkan akses yang luas

untuk menjangkau mereka. Mengapa sektor UMKM perlu penyaluran modal? Karena sektor UMKM nasional dikenal memiliki karakteristik positif seperti sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodasi peran masyarakat miskin dan dominan dalam struktur ekonomi. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka kemungkinan usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan akan sulit diupayakan.

Pemberian kredit atau permodalan modal kepada pelaku UMKM, secara langsung akan mempengaruhi volume usaha bila hal tersebut digunakan menjadi modal kerja. Jika kredit tersebut digunakan untuk investasi atau untuk melakukan diversifikasi usaha, maka akan meningkatkan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menambah volume usaha juga. Pertambahan volume usaha tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan bagi UKM maupun tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan diharapkan mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain itu lembaga keuangan yang ada dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan umum dihadapi oleh mereka.

PERAN PERBANKAN SYARIAH

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian secara mikro, peranan ini antara lain sektor UMKM yang dikenal sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar secara nasional, mengakomodasi peran masyarakat miskin dalam struktur ekonomi, serta merupakan sektor yang berpotensi besar memberikan sumbangan pada PDB. Maka dari itu, suatu kewajiban bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait mengambil posisi terdepan dalam mendorong sektor ini berkembang

dengan lebih baik. Salah satu upaya yang merupakan daya pendorong terhadap perkembangan sektor UMKM adalah memberikan kemudahan akses pemberian modal usaha bagi sektor UMKM.

Edy Setiadi selaku Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia mengutarakan bahwa fokus peran perbankan syariah saat ini adalah membantu sektor UMKM. Perbankan syariah menyadari sektor UMKM adalah sektor terbesar di masyarakat Indonesia. Ada sekitar 52 juta unit UMKM yang aktif di Indonesia dan sebanyak 9 persen diantaranya bergerak di sektor mikro. Terkait dengan pendanaan modal kerja, bank syariah menyalurkannya melalui pembiayaan langsung maupun tidak langsung. Beberapa perbankan syariah memanfaatkan *baitul maal wat tamwil* (BMT) untuk menyalurkan pembiayaan.

Masing-masing bank syariah mempunyai berbagai strategi pembiayaan misalkan bank syariah mendirikan pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM. Di samping itu dikembangkan pula konsep *linkage*, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKMinya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Program ini berjalan karena bank syariah besar belum menjangkau sentra masyarakat usaha mikro dan kecil. Di samping itu lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM. Pembiayaan *linkage* antara bank syariah dengan BMT dapat berupa *join financing* dan *executing*. *Joint financing* adalah bank syariah dan BMT sama-sama memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Sedangkan *executing* adalah bank syariah menyediakan pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh BMT dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKMinya.

Renny oktafia juga menyatakan bahwa terdapat 3 bentuk *linkage* program antara perbankan syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah, yaitu pertama, *bentuk channeling* yang artinya lembaga keuangan mikro syariah tidak mempunyai wewenang memutuskan pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah lembaga keuangan mikro syariah, karena bertindak hanya sebatas

agen. Kedua, *bentuk executing* yang artinya pembiayaan yang berasal dari bank syariah diberikan kepada lembaga keuangan mikro syariah, untuk disalurkan kepada nasabahnya dan lembaga keuangan mikro syariah mempunyai wewenang memutuskan pembiayaan disetujui atau tidak. Ketiga, *bentuk joint financing* yang artinya pembiayaan bersama bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah, dimana kewenangan berada pada kedua pihak dan outstanding dicatat sesuai dengan porsi pembiayaan kepada nasabah lembaga keuangan mikro syariah. (Oktavia, 2014)

Guna meningkatkan peran perbankan syariah untuk sektor UMKM, perbankan syariah juga menjalin program kemitraan dengan usaha yang belum bankable, linkage program dengan lembaga keuangan mikro sebagai upaya memperluas pelayanan pendanaan. Adapun produk layanan perbankan syariah yang menjadi panduan bagi sektor UMKM antara lain :

1. Bagi hasil (Musyarakah), yaitu keuntungan yang diperoleh akan dibagi dalam rasio yang disepakati diawal, sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan.
2. Mudharabah, yaitu sebuah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Berdasarkan dua jenis layanan perbankan syariah yang berpotensi tinggi membantu pelaku usaha sektor UMKM di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dari lembaga perbankan syariah sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Artinya, perbankan syariah memiliki aturan dan toleransi terhadap kondisi usaha serta memfasilitasi kebutuhan pengusaha dan nasabah akan sarana

pembiayaan. Salah satu produk unggulan untuk pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perbankan syariah adalah mudharabah, dalam sistem mudharabah penentuan bagi hasil berpedoman kepada untung rugi si peminjam. Besarnya jumlah bagi hasil yang disetorkan kepada lembaga syariah, diketahui setelah berusaha atau sesudah ada hasil keuntungannya. Karena sistem mudharabah adalah bagi hasil dan berpedoman pada untung rugi, sehingga hal ini dirasa sangat cocok untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah bagi para pelaku usaha kecil karena tidak merasa terbebani.

TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH

Perbankan syariah sudah menjalankan berbagai macam strategi dalam pengembangan UMKM, namun secara kuantitatif sampai bulan Januari 2013 belum begitu maksimal. Hal tersebut terjadi karena aspek makro, mikro dan epistimologi pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

1. Penyebab dari aspek makro disebabkan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya krisis ekonomi di beberapa Negara.
2. Penyebab aspek mikro, perlu adanya upaya perbaikan sarana atau infrastruktur, baik berupa infrastruktur yang bersifat fisik maupun non fisik agar sektor tersebut mampu memproduksi dan bekerja secara efisien. Pembenahan sektor UMKM diharapkan mampu menekan risiko yang melekat pada sektor tersebut. Pada sisi perbankan syariah perlu adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian bankir syariah pada dunia UMKM di semua sektor. Sehingga pembiayaan perbankan syariah tidak hanya konsentrasi pada sektor retail, jasa usaha dan perdagangan saja tetapi juga sektor potensial lainnya, khususnya sektor produktif seperti sektor pertanian dan manufaktur.
3. Sedangkan dari sisi epistimologi pengembangan lembaga keuangan syariah nampaknya secara mainstream masih menggunakan pendekatan Islamisasi lembaga keuangan konvensional dengan berasaskan pada kaidah maslahat. Sehingga sampai saat ini lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak akan mampu melepaskan diri dari permasalahan

fundamental seperti kerangka sistem yang berbasis pada bunga, ketidakstabilan standar mata uang dan pola pikir permissive akibat lingkungan kehidupan yang belum ideal.

Ketersediaan jaminan merupakan salah satu hambatan bagi UMKM dalam mengajukan pembiayaan, sebab sebagian besar UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut. Bank biasanya tidak dapat memberikan pembiayaan kepada orang yang tidak memiliki jaminan yang cukup. Hambatan lain bagi UMKM dalam memperoleh pembiayaan dari bank syariah adalah masih minimnya aspek legalitas dan administrasi. Sebagian besar UMKM tidak memiliki administrasi yang teratur bahkan banyak yang mengalami permasalahan dalam arus kasnya. Mereka menganggap bahwa sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah terlalu rumit karena setiap bulan mereka harus menghitung berapa persen laba yang harus disetorkan kepada bank.

Selain itu, pemerataan pembiayaan bank syariah ke semua wilayah masih kurang dan pengetahuan masyarakat mengenai sistem bank syariah masih sangat minim. Di kota kecil, hanya sedikit masyarakat yang benar-benar mengetahui tentang sistem dan kelebihan pembiayaan bank syariah. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa bank syariah itu hanya bank yang menabungnya di kantor pos dan tidak berikir untuk mengajukan pembiayaan. Hal itu tidak terlepas dari keterbatasan bank syariah di daerah tersebut, sehingga kebanyakan UMKM masih terfokus pada pembiayaan konvensional yang menggunakan sistem bunga.

Penetapan harga produk bank syariah yang kadang lebih tinggi dari bank konvensional juga mempunyai pengaruh pada kurangnya minat masyarakat dalam mengakses produk bank syariah, karena harga tersebut relatif memberatkan pelaku UMKM, apalagi yang memiliki pendapatan relatif kecil. Saat ini banyak bank konvensional yang menawarkan kredit dengan bunga kecil kepada UMKM. Hal itu tidak terlepas dari dominasi bank-bank konvensional karena dari segi umur bank konvensional lebih dikenal oleh masyarakat dari pada bank syariah.

KESIMPULAN

Melihat peluang yang demikian besar maka pengelola usaha kecil dan menengah (UKM) perlu bekerja sama atau menggunakan jasa perbankan yang berbasis syariah. Perbankan syariah merupakan layanan perbankan yang dirasa sesuai dengan karakteristik pelaku usaha UMKM, kesesuaian ini ditinjau dari pelaksanaan prinsip bagi hasil serta adanya pendampingan usaha. Namun, untuk membuat perbankan syariah memberikan dukungan yang maksimal, perlu dukungan faktor internal maupun eksternal yang berupa jaminan profitabilitas, rentabilitas dari sektor UMKM sendiri serta kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Selain dukungan dari pemerintah berupa kebijakan khusus sebagai stimulus pada sektor UMKM ini, diperlukan pula peningkatan pengetahuan dan keahlian bankir syariah pada dunia UMKM disemua sektor, terutama pemahaman preferensi para pelaku usaha dalam pemilihan bank yang dipilihnya sebagai rekanan pembiayaan modal kerjanya.

Oleh karena itu maka perlu adanya solusi untuk mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan bank syariah. Semua pihak harus berperan dalam hal ini, baik pemerintah, bank syariah, dan UMKM sendiri. Bank syariah diharapkan dapat lebih memperluas akses dan mensosialisasikan kelebihanannya dengan baik sehingga bank syariah bisa menjadi penguat dan pendamping pengembangan UMKM. Sementara pemerintah dapat memberikan fasilitas pelatihan manajemen bagi para pelaku UMKM agar kompetensi mengenai pengelolaan administrasi usaha dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Djoko Kristianto. (1998). No Title, 86–97.

Kara, M. (2008). KONTRIBUSI PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO , KECIL , DAN MENENGAH, 315–322.

Lestari, R. (n.d.). Perbankan syariah sebagai daya pendorong usaha mikro kecil menengah di indonesia.

Oktafia, R. (2017). PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PERKUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI JAWA TIMUR, (110), 85–92.

Sholahuddin, M., & Surakarta, U. M. (2011). TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERANANNYA, 496–500.

Suci, Y. R., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2017). PERKEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA, 6(1), 51–58.